

**ANALISA PENERAPAN SISTEM PENYALURAN KREDIT UNTUK
MEMINIMALISASI KREDIT MACET
(STUDI KASUS PADA BANK 'X' DI SURABAYA)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI**



DIAJUKAN OLEH

ZAENUL ARIFIN

No. Pokok : 049715813

**KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

SKRIPSI

ANALISA PENERAPAN SISTEM PENYALURAN KREDIT UNTUK MEMINIMALISASI KREDIT MACET (STUDI KASUS PADA BANK 'X' DI SURABAYA)

DIAJUKAN OLEH :

ZAENUL ARIFIN

No. Pokok : 049715813

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH :

DOSEN PEMBIMBING,

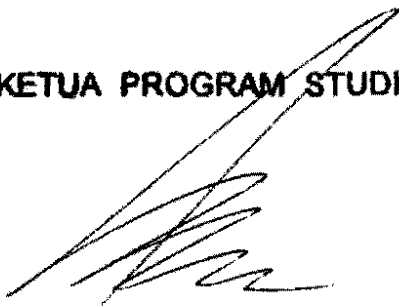


Dra. Ella Mustikasari M, Si., Ak.

Tanggal

22/01/2002

KETUA PROGRAM STUDI,



DR. Muslich Anshori, M.Sc., Ak.

Tanggal

24-07-2002

Surabaya, tanggal 18/09/2001 .
Bimbingan selesai dan siap diuji
Dosen Pembimbing,


Dra. Elia Mustikasari M.Si., Ak.



ABSTRAKSI

Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam berbagai alternatif investasi. Sejalan dengan karakteristiknya, bank merupakan segmen usaha yang banyak diatur pemerintah. Krisis ekonomi memberi hikmah bagi perbankan nasional dalam pengucuran kredit. Bahwa keuntungan besar juga bisa didapat dari kredit sektor ritel. Namun bank-bank yang bergerak pada kredit sektor ritel harus menghadapi kondisi bahwa pada perusahaan menengah ke bawah jarang memiliki pembukuan yang benar sehingga sulit untuk melakukan analisis laporan keuangan, sehingga seringkali analisis atas laporan keuangan diabaikan dan perhatian bank hanya terfokus pada nilai agunan yang diserahkan oleh perusahaan pemohon kredit kepada bank.

Setiap Kebijakan Perkreditan Bank yang dibuat bank wajib memuat dan menetapkan dengan jelas dan tegas prinsip kehati-hatian yang minimal harus meliputi kebijakan pokok perkreditan, tatacara penilaian mutu kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan. Pemberian kredit harus diproses melalui tahapan-tahapan permohonan kredit, penilaian permohonan pemberian kredit, kebijaksanaan persetujuan kredit, perjanjian kredit dan persetujuan pencairan kredit. Dalam KPB setiap bank harus diatur dan dicantumkan tata cara penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah, yang menjadi acuan dalam setiap penyelamatan dan penyelesaian kredit-kredit yang menurun kolektibilitasnya, dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dan langkah-langkah rasional dalam penyelesaiannya.

Penelitian ini merupakan penelitian terapan (*applied research*) dengan pendekatan kualitatif, melalui metodologi studi kasus. Obyek penelitian adalah Bank 'X' di Surabaya dengan unit analisis sebuah kasus pemberian kredit pada pengusaha mebel yang bermasalah di tahun 2000, kemudian direstrukturisasi dan berakhir dengan eksekusi agunan. Teknik analisisnya adalah analisis komparatif.

Prosedur pemberian kredit Bank 'X' secara garis besar telah sesuai dengan ketentuan BI. Ada beberapa prosedur yang berbeda, karena disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi. Namun ada celah-celah yang dapat mengakibatkan kredit macet. Yakni pada kelengkapan dokumen persyaratan permohonan kredit yang berkaitan dengan laporan keuangan karena nasabah pada kredit ritel cenderung tidak memiliki laporan keuangan. Laporan keuangan yang dipakai untuk analisa kredit disusun oleh bank berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah, sehingga memungkinkan adanya manipulasi karena subyektifitas. Celah lain adalah pada analisis pemberian kredit pada Bank 'X' yang lebih ditekankan pada analisis terhadap nilai agunan yang dijaminakan dibanding analisis prospek usaha nasabah dan pemberian fasilitas penyelamatan kredit yang hanya ditekankan pada itikad baik nasabah untuk melunasi kreditnya serta lebih bersifat kekeluargaan.